

## Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu

Feny Sahara<sup>1\*</sup>, Faizal Anwar<sup>2</sup>, Titi Darmi<sup>3</sup>

<sup>\*1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Bengkulu-Jl. Bali, Kp. Bali Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu

E-mail : [fenysaharaysff@gmail.com](mailto:fenysaharaysff@gmail.com). No. HP : 089626956076

**Abstract:** The distribution of Non-Cash Food Aid (BPNT) by the Bengkulu City Government aims to fulfill basic food needs for the underprivileged, but there are problems encountered in the field such as inaccuracy of targets in distribution and the distribution is not timely. Researchers are interested in investigating more deeply how the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy and what are the obstacles in implementing the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy in Muara Bangkahulu District, Bengkulu City. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. The results of the research regarding the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy in Muara Bangkahulu District are: (1) Interorganizational communication carried out by the implementers, namely starting before the launch of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program through e-Warong in Muara Bangkahulu District has been implemented well, (2) the characteristics of implementers in the process of implementing BPNT policies through e-Warong in Muara Bangkahulu District in providing services to KPMs are in accordance with existing procedures, (3) Social, Economic and Political conditions in the distribution of BPNT in Muara Bangkahulu District has been good in the process of distributing BPNT, and (4) The disposition or attitude of the implementers of the parties in the implementation of the Non-Cash Food Assistance Policy (BPNT) has been realized quite well to the community in Muara Bangkahulu District so that the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Policy (BPNT) is running in accordance with applicable regulations and Alan effectively.

**Keywords:** Non-Cash Food Assistance (BPNT), Policy Implementation

**Abstrak:** Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Pemerintah Kota Bengkulu ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu, namun terjadinya permasalahan yang ditemui di lapangan seperti ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dan pembagiannya tidak tepat waktu. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu secara: (1) Komunikasi Interorganisasional yang dilakukan oleh para pelaksana yaitu dimulai sebelum diluncurkannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong

di Kecamatan Muara Bangkahulu sudah dilaksanakan dengan baik, (2) Karakteristik pelaksana dalam proses implementasi kebijakan BPNT melalui e-Warong di Kecamatan Muara Bangkahulu dalam memberikan pelayanan kepada KPM sudah sesuai dengan prosedur yang ada, (3) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dalam penyaluran BPNT di Kecamatan Muara Bangkahulu pengaruhnya sudah baik dalam proses penyaluran BPNT, dan (4) Disposisi atau sikap pelaksana pihak-pihak dalam implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah terealisasi dengan cukup baik kepada masyarakat di Kecamatan Muara Bangkahulu sehingga Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan efektif.

**Kata kunci:** Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Implementasi Kebijakan.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang paling memprihatinkan dari setiap negara. Dalam arti yang lebih kecil, kemelaratan dianggap sebagai kondisi tidak adanya uang tunai dan barang dagangan untuk menjamin ketahanan. Sementara itu, kemelaratan dari perspektif yang luas adalah keanehan yang kompleks atau multi-segi. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan penduduk suatu negara untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesejahteraan dan ketiadaan pekerjaan (Darmi, T., & Mujtahid, I. M. 2020).

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2021 proporsi masyarakat miskin berubah menjadi 10,14% dari keseluruhan penduduk Indonesia atau sekitar 27,54 juta manusia. Sementara itu, jumlah masyarakat miskin pada September 2021 berubah menjadi 26,50 juta manusia, lebih rendah 1,05 juta jumlah masyarakat dibandingkan September 2020 dan lebih rendah 1,04 juta manusia dari Maret 2021. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui kebijakan Bantuan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sembako yang diberikan secara non-uang dari pihak berwenang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan sebesar Rp. 110.000/KPM, namun pada tahun 2020 harga bantuan BPNT yang semula Rp. 110.000,- sesuai KPM setiap bulannya akan naik menjadi Rp. 200.000,- sesuai KPM per bulan (Kemensos RI, 2020), melalui mekanisme rekening digital berbentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan tersebut tidak dapat diuangkan, namun dapat ditukarkan dengan beras

atau telur melalui E-Warong atau dealer yang telah disediakan bekerjasama dengan Bank BRI. Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dapat memaksimalkan keistimewaan para penerima manfaat dan dapat berjalan dengan efektif dan kondusif, serta mengantarkan manusia Bengkulu menjadi lebih sejahtera di masa depan. Tujuannya untuk menumbuhkan efektivitas penyaluran bansos agar jauh lebih fokus dan mendorong terpenuhinya inklusi ekonomi di kalangan masyarakat, khususnya kelas bawah (APS, 2018).

Di Provinsi Bengkulu sendiri penyaluran BPNT ini menjadi terlaksana pada tahun 2018 yang diberikan tanpa penundaan dengan bantuan penggunaan Menteri Sosial Idrus Marhan diamati dengan bantuan penggunaan Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Untuk BPNT Provinsi Bengkulu terdapat kabupaten/kota yang telah melakukan pengajuan BPNT pada tahun 2018 khususnya Kota Bengkulu yang mencapai 1.727 KPM dan Kabupaten Rejang Lebong yang mencapai 21.465 KPM dengan biaya sebesar 2,1 M. Untuk tahun 2021 ragam KPM di Provinsi Bengkulu telah berkembang dibandingkan tahun 2018 (Awalnya BPNT ini menjadi peruntukan di Provinsi Bengkulu) yang mencapai 20.447 KPM (BPS Bengkulu, 2021).

Pada Juli 2021 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bengkulu menjadi 15.494 KPM. Di Kota Bengkulu terdapat sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Gading Cempaka, Kampung Melayu, Muara Bangkahulu, Ratu Agung, Ratu Samban, Selebar, Singaran Pati, Sungai Serut dan Teluk Segara. Setiap kecamatan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dan menikmati aplikasi dari pemerintah ini. Untuk Kecamatan Muara Bangkahulu, ragam KPM tahun 2021 dari aplikasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 1.953 KPM untuk 7 desa di Kecamatan Muara Bangkahulu.

Dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui sarana Pemerintah Kota Bengkulu, tidak jarang kendala yang dihadapi di lingkungan disiplin termasuk yang terjadi pada Program Kesejahteraan Beras (RASTRA) dulu sampai sekarang. , khususnya ketidaktepatan tujuan dalam penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Artinya, dalam aplikasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini yang bertujuan untuk mendorong pemenuhan inklusi keuangan di dalam jaringan, khususnya keanggunan pusat perbelanjaan, namun sebenarnya tidak jarang ditemukan di dalam disiplin itu. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang harus mendapatkan sekarang tidak lagi mendapatkannya, sebaliknya individu yang sekarang harus tidak lagi

mendapatkan melainkan mendapatkan. Kemudian ditemukan masalah yang berbeda, termasuk distribusi sumber daya yang sekarang menjadi tidak tepat waktu, yang terkadang tidak lagi selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi aplikasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan untuk jaringan keelokan pusat penurunan ini sesuai dengan target sistem ini agar sistem ini tidak lagi muncul sebagai mubazir.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis mendeskripsikan permasalahan tersebut sebagai upaya terakhir yang berjudul "Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu".

## **METODE**

Teknik yang digunakan dalam penelitian pada Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu adalah dengan penggunaan teknik deskriptif kualitatif yang sebagian besar untuk menyediakan statistik deskriptif dalam bentuk frase tertulis atau lisan. dari manusia dan perilaku lokasi. Peneliti memilih teknik kualitatif untuk mencapai statistik yang ekstra efektif, lengkap dan bersih. Sumber statistik dari penelitian ini adalah statistik nomor satu dan statistik sekunder yang menggunakan strategi deret statistik dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Evaluasi data yang digunakan berupa strategi deret statistik, reduksi, penyajian statistik dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam rangka meningkatkan pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud di atas, selain menumbuhkan aturan di dalam subjek keamanan sosial dan diarahkan untuk membangun sistem keamanan sosial, khususnya bagi orang miskin. Penyelenggaraan BPNT di Indonesia diharapkan dapat membantu masyarakat miskin, bagian dari masyarakat yang sangat menginginkan bantuan dari siapa saja, khususnya dari pemerintah. Penerapan BPNT secara berkelanjutan hingga minimal tahun 2021 akan mendongkrak keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk melihat implementasi software BPNT yang disalurkan kepada KPM di Kabupaten Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, peneliti mengangkat berbagai rambu yang sejalan dengan Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2009) khususnya Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Pelaksana, Ekonomi, Sosial dan Kondisi Politik dan Disposisi atau Sikap Pelaksana. . Untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut ini:

### **1. Komunikasi Antarorganisasi**

Dalam sebuah peliputan apa saja keinginan dan tujuan peliputan yang harus dikomunikasikan kepada lembaga tujuan agar dapat mengurangi distorsi implementasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Muara Bangkahulu dari segi komunikasi sudah cukup baik, komunikasi dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah dilakukan sebanyak 5 kali, dihadiri oleh camat, lurah, penyuluh sosial kecamatan, TKSK (tersedia di setiap kecamatan), pemilik e-Warong serta perwakilan masyarakat yang menerima bantuan ini.

Sosialisasi tentang BPNT sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan cukup baik, mengapa dikatakan demikian? Sesuai dengan pedoman umum BPNT 2019, tujuan sosialisasi tentang BPNT ini adalah:

- a. Memberikan pengetahuan kepada pemangku kepentingan pada tingkatan yang berharga dan terdekat mengenai pedoman dan program BPNT.
- b. Memberikan pengetahuan kepada KPM tentang motif dan mekanisme pemanfaatan program BPNT.
- c. Memberikan fakta tentang mekanisme pengadaan BPNT.

Maka sosialisasi tentang BPNT ini dilakukan dengan tujuan agar kebijakan BPNT dipahami dan dapat diketahui dengan menyeluruh dengan dilakukan komunikasi secara menyeluruh kepada masyarakat dan pihak pemangku kepentingan seperti pemerintah Kecamatan Muara Bangkahulu yang tujuannya adalah untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat berjalan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.

## **2. Karakteristik Pelaksana**

Pelaksana adalah mereka yang mewujudkan setiap kebijakan yang harus didukung oleh setiap sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendistribusian BPNT di Kecamatan Muara Bangkahulu ditinjau dari karakteristik pelaksana, terdapat beberapa kendala di beberapa kelurahan yaitu adanya masyarakat yang menukarkan saldonya kepada agen e-Warong BRI di desa-desa yang bukan tempat tinggalnya, padahal masing-masing kelurahan tersebut telah memiliki e-Warong yang direkomendasikan oleh lurahnya masing-masing. Kemudian kendala lainnya adalah untuk stok barang. Dahulu pendistribusian barang yang disediakan di e-Warong sudah selesai, namun karena masyarakat bebas memilih kebutuhan apa saja yang diinginkan, maka barang yang banyak dipilih cepat habis, seperti beras dan telur. Yang kemudian dapat menghambat pendistribusian kebutuhan masyarakat, karena itu masyarakat harus menunggu lagi barang yang mereka butuhkan.

Ciri-ciri pemaksaan aktor terutama didasarkan sepenuhnya pada efek studi yang telah dilakukan terutama didasarkan sepenuhnya pada wawancara adalah sifat-sifat yang ada pada aktor pemaksaan di dalam Kelurahan di mana aktor pemaksaan tegas, disiplin, tipe dan menyenangkan untuk setiap jaringan yang menerima bantuan ini. Untuk ciri-ciri perangkat lunak BPNT yang sesuai di Kabupaten Muara Bangkahulu, hasil akhirnya adalah para pelaku pembebanan mulai dari Kelurahan, Pembantu, Koordinator dan Pemilik e-Warong telah memenuhi standar, terutama bahwa setiap pelaku memiliki karakter penawaran umum yang berperilaku dengan cara yang sopan dan menyenangkan bagi orang-orang yang terdaftar sebagai KPM. Hal ini dapat berdampak positif terhadap pelaksanaan Implementasi Kebijakan BPNT sehingga implementasi ini dapat berjalan dengan baik.

## **3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Pada saat implementasi kebijakan ini tentunya tidak lepas efek dari ekonomi, sosial dan politik (ecospol). Pengaruh tersebut berdampak signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Dari hasil penelitian di Kabupaten Muara Bangkahulu dapat disimpulkan bahwa jika kita lihat dari segi sosial dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu sangat responsif dengan adanya BPNT ini, respon tersebut dapat dilihat dari cara masyarakat mendukung hal tersebut. bantuan, dengan membantu proses adanya barang di e-Warong meskipun masyarakat tidak menerima bantuan ini.

Namun jika dilihat dari data mata pencaharian warga disini, kondisi banyak masyarakat disini yang layak tetapi tidak mendapatkan bantuan ini dan juga waktu menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) para KPM masih belum terlaksana dengan baik hal itu dapat dilihat dari mesin EDC yang terkadang masih sering terjadinya kemacetan dalam pengoperasiannya, hal itulah yang dapat menyebabkan tidak efektifnya dalam pendistribusiannya.

#### **4. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Disposisi adalah dedikasi dan pola pikir aparat penegak hukum terhadap suatu kebijakan ataupun program, yang terkhusus dalam hal aparatur birokrasi. Jika implementor memiliki disposisi atau pola pikir yang baik, maka ia akan dapat melakukan suatu kebijakan/program dengan baik sesuai dengan kebutuhan liputan atau pembuat kebijakan, namun jika pelaksana memiliki pola pikir yang kurang efektif dengan pembuat kebijakan/program, maka cakupan atau teknik implementasi perangkat mungkin juga kurang efektif. .

Dari hasil kajian di Kabupaten Muara Bangkahulu, dapat disimpulkan bahwa selama frase disposisi atau pola pikir para pelaksana, bantuan atau pola pikir para pelaksana, dan pemerintah daerah dapat dikatakan telah terwujud cukup baik kepada masyarakat di Kabupaten Muara Bangkahulu agar Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjalan. sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan efektif.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan topik masalah di atas dalam penulisan skripsi ini, yang telah dideskripsikan dan telah diuraikan mengenai pelaksanaan dalam kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berikut kesimpulannya dapat ditarik :

1. Dari segi Komunikasi Antar Organisasi yang dilakukan oleh pelaksana yaitu sebelum diluncurkannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong di Kabupaten Muara Bangkahulu sudah terlaksana dengan baik.
2. Sikap pelaksana dalam proses implementasi kebijakan BPNT oleh e-Warong di kabupaten Muara Bangkahulu dalam memberikan pelayanan KPM sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini.
3. Kondisi sosial, ekonomi dan politik pendistribusian BPNT di Kabupaten Muara Bangkahulu berdampak positif terhadap proses pendistribusian BPNT.
4. Disposisi atau sikap pihak pelaksana dalam implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terpantau dengan baik di masyarakat Kabupaten Muara Bangkahulu, sehingga pelaksanaan Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan efektif.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa usulan yang peneliti rekomendasikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pengembangan kebutuhan teoritis dan praktis untuk mendukung kebijakan bantuan pangan non tunai (BPNT), khususnya di Kabupaten Muara Bangkahulu, Nama Kota Bengkulu sebagai berikut:

1. Pihak pelaksana perlu koordinasi yang baik agar tidak terjadi inkonsistensi data.
2. Perlu adanya respon cepat dari pejabat terkait untuk menangani perangkat EDC tersebut.
3. Harus dilakukan penilaian terhadap para pelaksana yang tidak dapat berperilaku baik dalam pelayanan publik.
4. Sehubungan dengan situasi sosial yang tidak mendukung, perlu diberikan lebih banyak bantuan dengan penerapan kebijakan bantuan pangan nontunai (BPNT).
5. Transparansi dan manajemen yang lebih ketat diperlukan untuk menghindari penyimpangan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul. 2014. Analisis Kebijakan; dari Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Akib Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1(1).
- APS. 2018. Mensos RI Serahkan PKH dan BPNT di Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu. <https://bengkuluprov.go.id/mensos-ri-serahkan-pkh-dan-bpnt-di-bengkulu/>
- Basriati, B. 2021. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Skripsi tidak diterbitkan. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- BPS Bengkulu, P. 2020. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. <https://bengkulu.bps.go.id/statictable/2021/07/07/629/jumlah-keluarga-penerima-manfaat-kpm-dan-anggaran-bantuan-sosial-pangan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu-2020.html>
- BPS Bengkulu, P. 2022. September 2021, Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu turun menjadi 14,43 persen. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. <https://bengkulu.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/719/september-2021->
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1).
- Kharismawati, IK. 2017. "Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya", Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNS. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia. 2019. "Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai"
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 di akses pada 06 Januari 2020 pada situs : <http://pusdatin.kemensos.go.id>
- Siregar, A. A. 2019. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu*. Tesis tidak diterbitkan. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Yulianto Kadji. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik dalam Fakta Realitas*. Gorontalo:UNG Press.

Zulbaidah. 2021. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh : UIN AR Raniry.